

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Indonesia ditentukan oleh posisi dan kekuatan setiap negara. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dapat berjalan harmonis jika kedua negara memiliki posisi dan kekuatan yang berimbang, sehingga tidak ada dominasi suatu negara terhadap negara lain. Salah satu hubungan yang terjalin di antara negara tersebut adalah hubungan di bidang pertahanan dan keamanan. Amerika Serikat merupakan salah satu negara adidaya yang mempunyai pengaruh luas di seluruh dunia, tak terkecuali bagi Indonesia. Posisi tersebut akan menempatkan kekuatan dominan Amerika Serikat terhadap Indonesia sehingga hanya akan merugikan Indonesia, namun kondisi tersebut tidak akan terjadi dengan melihat tujuan hubungan bilateral yang harus menguntungkan bagi kedua negara. Indonesia dipandang Amerika Serikat sebagai negara demokratis, penduduk yang besar, dan mayoritas beragama Islam sehingga menguntungkan kepentingan Amerika Serikat di bidang ekonomi, politik, hankam, dan ideologi liberal. Amerika Serikat dianggap penting bagi Indonesia karena mempunyai peranan penting sebagai salah satu kekuatan dunia.

Hubungan bilateral dalam bidang Hankam antara Indonesia dengan

mengalami pasang-surut dinamika kerjasama hankam kedua negara. Amerika Serikat merupakan salah satu negara pemasok alutsista Indonesia. Alutsista tersebut sebagian besar dalam kondisi yang kurang ideal sebagai alat pertahanan negara saat ini, sehingga kerjasama bilateral harus ditingkatkan untuk mendapatkan suku cadang alutsista tersebut. Indonesia mendapatkan embargo militer pada November 1999. Namun kondisi tersebut berangsur membaik pada pemerintahan Presiden George W. Bush Jr. Terpilihnya Presiden Barrack Obama dipandang membawa angin segar perubahan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat dengan mempertimbangkan aspek historis Obama dengan Indonesia. Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut guna diangkat sebagai judul skripsi, yaitu "Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat Bidang Pertahanan Keamanan Pasca Kemenangan Barrack Obama Tahun 2009"

## **B. Latar Belakang Masalah**

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat sudah terjalin cukup lama, akan tetapi mengalami pasang surut yang disebabkan oleh hubungan antara pemimpin kedua negara yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan Amerika Serikat terjalin pada masa pemerintahan Barrack Obama. Jalinan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika melingkupi berbagai macam aspek kehidupan, yaitu ekonomi, politik, budaya, dan sistem pertahanan keamanan.

atau objek kajian karena sistem pertahanan dan keamanan saat ini menjadi aspek terpenting dalam kedaulatan suatu negara. Sebelumnya diketahui jika hubungan kerjasama bidang Hankam kedua negara sering mengalami pasang surut.

Pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, Amerika dan Indonesia menjalin hubungan militer yang erat dan penuh dinamika, hal ini tidak terlepas dari keberadaan Presiden Soeharto yang dianggap oleh AS mampu membendung pengaruh ideologi komunis di Indonesia. Pada masa ini dinamika hubungan militer kedua negara terkait dengan masalah Timor-Timur dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kopassus TNI AD. Sejak tahun 1970-an Indonesia telah membeli persenjataan senilai ratusan juta dollar melalui program DCS (*Direct Commercial Sales*). Pada tahun 1977, Amerika Serikat memberikan otorisasi penjualan komersial kepada Indonesia sebesar US\$5,8 juta, kemudian angka DCS meningkat pada tahun 1978 yang mencapai US\$112 juta berupa pesawat tempur, pesawat angkut personel, heli tempur, tank, dan senjata M-16.<sup>1</sup>

Pada tahun 1991 semasa pemerintahan George Bush pasca peristiwa Pembantaian Santa Cruz, seluruh dana IMET bagi Indonesia dihentikan oleh Presiden Bill Clinton atas desakan *Conggress*. Dengan pemungutan suara, *Conggress* Amerika Serikat membatasi pemberian *International Military Education and Training* (IMET) atau Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional kepada Indonesia sebagai tanggapan terhadap peristiwa

---

<sup>1</sup> Daftar Bantuan Militer Amerika Serikat Kepada Indonesia dan Timor Timur,

pembantaian 270 penduduk sipil oleh tentara Indonesia dengan senjata otomatis M-16 yang disediakan oleh Amerika Serikat pada tanggal 12 November 1991 di Santa Cruz. Pada tahun 1995 kebijakan program IMET tersebut diamandemen menjadi Program E-IMET (*Expanded International Military Education and Training*) yang ditujukan kepada Indonesia, pada tahun 1996 Indonesia menerima bantuan E-IMET untuk pertama kalinya.<sup>2</sup>

Pada tahun 1999 hingga 2001, Amerika Serikat menjatuhkan hukuman politik berupa embargo pengadaan senjata militer akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Timor Timur.<sup>3</sup> Hubungan militer semakin dibatasi sampai semua jalinan militer dengan Indonesia diputuskan pada bulan September 1999 ketika militer Indonesia dan milisi kaki-tangannya menyerbu Timor Timur. Segera setelah itu, *Congress* melarang program pembiayaan militer asing dan semua program IMET sampai semua persyaratan terpenuhi, antara lain mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan hukum dan menjatuhkan hukuman atas anggota ABRI sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan pemberian bantuan kepada kelompok milisi-milisi. Tindakan selanjutnya *Congress* juga membatasi ekspor peralatan pertahanan dan keamanan klasifikasi “mematikan” ke Indonesia. Pada tahun 2002 Amerika Serikat mulai memulihkan program bantuan E-IMET untuk Indonesia.

---

<sup>2</sup> Daftar Bantuan Militer Amerika Serikat Kepada Indonesia dan Timor Timur, <<http://etan.org/news/2007/milglossarybh.htm>>, diakses tanggal 13 Juli 2012.

<sup>3</sup> Daftar Bantuan Militer Amerika Serikat Kepada Indonesia dan Timor Timur,

Namun Pemerintah Presiden Bill Clinton tetap menjalin kerjasama militer dalam bidang pelatihan militer bagi personel militer Indonesia terutama bagi Kopassus melalui program JCET (*Joint Combined Exchange Training*). JCET merupakan program pelatihan personel militer asing melalui anggaran unit operasi khusus (*Special Operation Forces*) dari *Defense Department*, meski *Congress* secara jelas telah melarang segala bentuk bantuan militer kepada Indonesia. Pelatihan tersebut berlangsung antara tahun 1992 sampai 1997, personel ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) mendapatkan 36 agenda pelatihan militer JCET meliputi topik-topik seperti "*Advanced Sniper Techniques*," "*Military Operations in Urban Terrain*," "*Psychological Operations*," "*Air Assault*," and "*Close Quarters Combat*." dari Pentagon.<sup>4</sup>

Terpilihnya George Walker Bush menjadi Presiden Amerika Serikat ke-43 ternyata mendapat dampak positif bagi hubungan Indonesia-AS, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Selain itu, embargo sejumlah kerja sama di bidang militer juga akan mencair. Penegasan itu disampaikan Kusnanto Anggoro, seorang pengamat politik dari CSIS.<sup>5</sup> Hubungan kerjasama militer kedua negara mulai dipulihkan kembali melalui program CTFP (*Regional Defense Counter Terrorism Fellowship Program*). Pada

---

<sup>4</sup> *Statement by Allan Nairn on the suspension of US military training aid to Indonesia*, May 9<sup>th</sup>, 1988, <<http://www.etan.org/news/news2/nairn.htm>>, diakses tanggal 13 Juli 2012.

<sup>5</sup> George W. Bush Akan Menguntungkan Indonesia, 15 Desember 2000, <[http://berita.kompas.com/read/2000/12/15/bush\\_akan\\_menguntungkan\\_indonesia](http://berita.kompas.com/read/2000/12/15/bush_akan_menguntungkan_indonesia)>, diakses

tahun 2002 sampai 2004, Indonesia telah menerima dana CTFP dalam jumlah yang besar US\$4 juta.<sup>6</sup>

Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan pencabutan embargo militer untuk Indonesia. Juru bicara Departemen Luar Negeri Sean McCormack menyatakan pembukaan kembali program dana militer luar negeri yang dihentikan akibat persoalan hak asasi manusia itu akan membantu Indonesia dalam usaha memerangi terorisme, keamanan perairan, dan pertolongan saat bencana alam.<sup>7</sup> Sejak menduduki sebagai jabatan Presiden Amerika Serikat, Presiden Bush Jr. telah melakukan upaya-upaya untuk membuka pembatasan legislatif dari *Congress* tersebut, dengan keberhasilan penghapusan sisa-sisa pembatasan sepenuhnya pada tahun 2006.

Pada bulan Mei 2005 *Secretary of State* Condoleeza Rice mengumumkan bahwa penjualan FMS (*Foreign Military Sales*) atas senjata klasifikasi “tidak mematikan” akan dibuka kembali pada bulan November 2005, ia menyatakan tidak berlakunya semua persyaratan hak asasi manusia yang dimandatkan oleh *Congress* dengan alasan “keamanan nasional”. Setelah itu, pada bulan Maret 2006 larangan penjualan persenjataan klasifikasi “tidak mematikan” ke Indonesia dihapuskan.

Pada tahun 2006, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memberikan kembali dana FMF (*Foreign Military Financing*) sebesar

---

<sup>6</sup> Collateral Damage, <<http://www.iwatchnews.org/2007/05/22/5737/collateral-damage>>, diakses tanggal 13 Juli 2012.

<sup>7</sup> Amerika Cabut Embargo Militer atas Indonesia, 23 November 2005, <<http://www.tempo.co/read/news/2005/11/23/05569573/Amerika-Cabut-Embargo-Militer-atas->

US\$990.000 bagi Indonesia setelah sempat dihentikan pada tahun 1999 pasca pembantaian pro demokrasi di Dili, Timor Timur. FMF menyediakan dana dan pinjaman bagi pemerintah asing untuk pembelian perlengkapan militer dan jasa terkait. Melalui FMF, *Defense Department* melakukan penjualan senjata secara langsung kepada pemerintah negara asing. Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia menerima bantuan EDA (*Excess Defense Articles*) atau surplus/kelebihan persediaan peralatan hankam, dengan klasifikasi persenjataan *non-lethal* atau “tidak mematikan”.<sup>8</sup> Bruce Vaughn menyebutkan bahwa:

*“The military-to-military relationship has been a key test of enhanced bilateral cooperation. In 2005, the Administration of President George Bush moved to remove restrictions on International Military and Education and Training (IMET), Foreign Military Financing (FMF), and Foreign Military Sales (FMS) programs for Indonesia. This was viewed by many as a first step toward normalizing the military-to-military relationship. Indonesia has been a key player in the war against terror in Southeast Asia and an increasingly important geopolitical actor in the Asia-Pacific region.”*<sup>9</sup>

Bagi Washington, nilai strategis Indonesia tidak hanya sebagai rekan dalam perang melawan terorisme di kawasan, tetapi juga sebagai penyeimbang pengaruh Tiongkok baik militer, politik, maupun ekonomi di kawasan asia tenggara yang semakin meningkat. Sekaligus peran penting Indonesia di ASEAN yang belakangan berambisi mendorong terciptanya “arsitektur kawasan” yang terintegrasi. Kerjasama bidang pertahanan dan

<sup>8</sup> Daftar Bantuan Militer Amerika Serikat Kepada Indonesia dan Timor Timur, <<http://etan.org/news/2007/milglossarybh.htm>>, diakses tanggal 20 Juni 2012.

<sup>9</sup> Bruce Vaughn, Specialist in Asian Affairs, *Indonesia: Domestic Politics, Strategic Dynamics, and U.S. Interests*, January 31, 2011, CRS Reports for Congress, RS22204, diakses tanggal 14 Juli 2012.

US\$990.000 bagi Indonesia setelah sempat dihentikan pada tahun 1999 pasca pembantaian pro demokrasi di Dili, Timor Timur. FMF menyediakan dana dan pinjaman bagi pemerintah asing untuk pembelian perlengkapan militer dan jasa terkait. Melalui FMF, *Defense Department* melakukan penjualan senjata secara langsung kepada pemerintah negara asing. Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia menerima bantuan EDA (*Excess Defense Articles*) atau surplus/kelebihan persediaan peralatan hankam, dengan klasifikasi persenjataan *non-lethal* atau “tidak mematikan”.<sup>8</sup> Bruce Vaughn menyebutkan bahwa:

*“The military-to-military relationship has been a key test of enhanced bilateral cooperation. In 2005, the Administration of President George Bush moved to remove restrictions on International Military and Education and Training (IMET), Foreign Military Financing (FMF), and Foreign Military Sales (FMS) programs for Indonesia. This was viewed by many as a first step toward normalizing the military-to-military relationship. Indonesia has been a key player in the war against terror in Southeast Asia and an increasingly important geopolitical actor in the Asia-Pacific region.”*<sup>9</sup>

Bagi Washington, nilai strategis Indonesia tidak hanya sebagai rekan dalam perang melawan terorisme di kawasan, tetapi juga sebagai penyeimbang pengaruh Tiongkok baik militer, politik, maupun ekonomi di kawasan asia tenggara yang semakin meningkat. Sekaligus peran penting Indonesia di ASEAN yang belakangan berambisi mendorong terciptanya “arsitektur kawasan” yang terintegrasi. Kerjasama bidang pertahanan dan

<sup>8</sup> Daftar Bantuan Militer Amerika Serikat Kepada Indonesia dan Timor Timur, <<http://etan.org/news/2007/milglossarybh.htm>> , diakses tanggal 20 Juni 2012.

<sup>9</sup> Bruce Vaughn, Specialist in Asian Affairs, *Indonesia: Domestic Politics, Strategic Dynamics, and U.S. Interests, January 31, 2011, CRS Reports for Congress,*



keamanan Amerika Serikat dengan Indonesia tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan perkembangan politik luar negeri China dan Rusia. Kedua negara tersebut merupakan negara yang secara ideologi berseberangan dengan Amerika Serikat.

Di kawasan Asia Timur, China berhadapan dengan Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara tersebut mendapat dukungan peralatan dan personel militer dari Amerika Serikat. Amerika Serikat membangun pangkalan militer di wilayah Jepang dan Korea Selatan. Sebagaimana diketahui, China telah berhasil melakukan transformasi di bidang militernya. Salah satu latar belakang perkembangan militer China didasari oleh motif untuk mencapai posisi sebagai negara terkuat secara regional dan global. Jumlah penduduk China yang sangat besar turut mendukung transformasi militer, salah satunya pada bagian besarnya jumlah personil militer China. Selain itu, China juga mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi. Hampir semua produk-produk China menyebar sampai ke seluruh dunia. Hal tersebut kemudian mendorong kebangkitan China sebagai raksasa ekonomi baru di dunia dengan kekuatan ekonomi hampir menyamai Amerika Serikat.<sup>10</sup> Tumbuhnya kekuatan ekonomi global China dengan majunya teknologi, maraknya pabrik-pabrik ekspor, pasar saham, meningkatnya surplus perdagangan dengan AS, dan penawaran akuisisi bagi perusahaan Amerika oleh China menjadi sebuah peringatan yang cukup nyata bagi para pengambil kebijakan Amerika Serikat

---

<sup>10</sup> 'Hampir Ungguli AS, China Tidak Besar Kepala', 29 Juni 2012,

<http://www.kompas.com/indonesia/read/2012/06/29/hampir-ungguli-as-china-tidak-besar-kepala>

terhadap masa depan ekonominya. Kemajuan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong bagi China untuk melakukan modernisasi kekuatan militernya. China meningkatkan anggaran belanja militer untuk melakukan riset dan pengembangan terhadap senjata bekas militer Uni Soviet. Anggaran pertahanan China pada tahun 2011 adalah 119,8 miliar dollar AS. Di tahun 2015, anggaran akan dinaikkan dua kali lipat menjadi 238,2 miliar dollar AS, atau mengalami kenaikan sekitar 18,75% per tahun dalam kurun waktu tersebut.<sup>11</sup> Dengan kenaikan anggaran tersebut, China berhasil melakukan inovasi terhadap senjata-senjata tersebut dan mengubahnya menjadi senjata dengan kemampuan yang lebih baik. Kemajuan yang dicapai China tersebut kemudian menjadi peringatan bagi Amerika Serikat untuk membendung laju China, diantaranya melalui kerjasama dengan negara-negara yang berada dalam regional sama dengan China, seperti Korea Selatan dan Jepang, termasuk juga Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Selain karena perkembangan politik internasional China, kerjasama Amerika Serikat dengan Indonesia juga berhubungan dengan situasi internasional Rusia. Sama seperti China, Rusia juga negara yang memiliki perbedaan ideologi dengan Amerika Serikat. Apabila kemajuan China didukung oleh pertumbuhan ekonomi negaranya, maka kemajuan Rusia lebih didukung oleh kemajuan produksi senjata militernya. Rusia merupakan salah satu negara pecahan Uni Sovyet terbesar yang mewarisi persenjataan Uni

---

<sup>11</sup> 'Pertahanan China Diperkuat', 15 Februari 2012,

[http://internasional.kompas.com/read/2012/02/15/07285684/Pertahanan\\_China\\_Diperkuat](http://internasional.kompas.com/read/2012/02/15/07285684/Pertahanan_China_Diperkuat)

Soviet sehingga masih memiliki peralatan militer yang unggul, baik jumlah maupun kualitasnya. Rusia juga merupakan negara produsen berbagai peralatan dan senjata militer yang baik. Tujuan utama ekspor senjata-senjata Rusia adalah China dan Iran.<sup>12</sup> Rusia bahkan membuka hubungan kerjasama pertahanan dengan Arab Saudi yang merupakan negara pembeli senjata militer terbesar di dunia yang juga telah bekerja sama dengan Amerika Serikat.<sup>13</sup> Hubungan kerjasama Rusia sebagai negara penghasil senjata militer dengan berbagai negara dalam hal ini melatarbelakangi Amerika Serikat untuk menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai negara, salah satunya Indonesia yang merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, sehingga kedudukannya sebagai pengekspor senjata militer tidak terganggu oleh kemajuan Rusia.

Selain karena perkembangan China dan Rusia, kerjasama Amerika Serikat dengan Indonesia juga dipengaruhi faktor lain. AS berharap bahwa ikatan personal Obama dengan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim di dunia dapat sedikit membantu memulihkan citra AS yang hancur lebur beberapa tahun terakhir.<sup>14</sup> Berbagai hal tersebut pada akhirnya mendorong Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan Indonesia, khususnya di bidang pertahanan keamanan.

---

<sup>12</sup> 'Rusia Capai Rekor Ekspor Senjata', 25 Desember 2007, <<http://www.dw.de/rusia-capai-rekor-ekspor-senjata/a-3021841-1>>, diakses tanggal 17 Desember 2012.

<sup>13</sup> Arab Saudi Konsumen Senjata Rusia Terbesar, 30 Agustus 2009, <<http://www.sabili.co.id/internasional/arab-saudi-konsumen-senjata-rusia-terbesar>>, diakses tanggal 17 Desember 2012

<sup>14</sup> Evan A. Laksmana, Obama dan hubungan AS-Indonesia, Jawa Pos, 22 maret 2010, <<http://www.csis.or.id/Publications-Opinions/Detail.php?id=771>>, diakses tanggal 21 Juni

Presiden Barrack Obama dan Presiden SBY menandatangani sebuah perjanjian bilateral bernama *The Comprehensive Partnership Agreement*, perjanjian tersebut meliputi *Political and Security Cooperation, Economic and Development Cooperation, and Socio-cultural, educational, science and technology, and other cooperation*.<sup>15</sup> Perjanjian tersebut juga membahas rencana strategis Amerika Serikat dalam upaya pemulihan hubungan militer kedua negara yang telah dirintis semasa pemerintahan Presiden George W. Bush. Perjanjian ini meliputi kesepakatan bersama mengenai pengadaan C-130 Hercules melalui program FMF (*Foreign Military Financing*) pada Juli 2010 di Jakarta.<sup>16</sup>

Tampilnya Partai Demokrat yang mengedepankan humanisme dalam politik luar negeri AS akan membuka peluang implementasi yang lebih dari sekedar pergelaran kekuatan militer ofensif di berbagai kawasan dunia, tidak bersifat kebijakan luar negeri unilateral yang selama delapan tahun terakhir ini diterapkan pemerintahan AS di bawah kepemimpinan George W. Bush Jr.

Harus diakui, posisi Barrack Obama sebagai Presiden AS, dalam pemerintahan AS mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri AS. Peran Presiden secara pribadi dapat diartikan sebagai aktor yang sifatnya individu, sedangkan Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif adalah aktor yang sifatnya kelompok.

---

<sup>15</sup> "Plan of Action to implement the Indonesia-US Comprehensive Partnership," Bureau of East Asian & Pacific Affairs, Department of State, September 17, 2010.

<sup>16</sup> "U.S. to Help RI in Procurement of Six Hercules," *Jurnal Nasional*, June 1, 2009. "RI's First Defense University," *The Jakarta Post*, March 12, 2009.

Namun pada konteks lain, peran Presiden selain bisa bersifat aktor individu juga bisa bersifat sebagai aktor organisasi ataupun negara (sekaligus bisa berperan sebagai Legislatif dan Eksekutif). Hal ini dikarenakan Presiden adalah bagian dari simbol sebuah negara. Oleh karena itu, peran Presiden juga sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Kebijakan keamanan luar negeri Presiden Barrack Obama tidak terlepas dari agenda politik Partai Demokrat secara langsung. Presiden Barrack Obama diusung oleh Partai Demokrat dalam pemilu terkahir mengalahkan pasangan presiden dari Partai Republik atau Kubu Hawkish. Sudah sejak perang Vietnam, Partai Demokrat lebih terkenal dengan agenda dalam negeri yang mendukung program sosial. Sedangkan agenda luar negerinya lebih banyak menawarkan kebijakan politik untuk menghindari perang. Sebaliknya, kebijakan luar negeri Partai Republik lebih menonjolkan keputusan-keputusan politik realisme yang mendukung penyelesaian militer, dan kebijakan dalam negerinya berseberangan dari program sosial. Hawkish adalah karakter yang menunjukkan kekerasan dan agresivitas sebagai sikap utama dalam mencapai tujuan politik. Hal ini terlihat dari era kepemimpinan Clinton memperlihatkan politik luar negeri yang kooperatif, bersifat kerja sama multilateral dan ...  
... dalam negeri. Sebaliknya pemerintahan Bush

menampilkan kebijakan sepihak, bersifat unilateral dan memperburuk kondisi perekonomian dalam negeri.<sup>17</sup>

Presiden Barrack Obama yang notabene sama berasal dari Partai Demokrat seperti pendahulunya Presiden Bill Clinton, tentu akan mengedepankan diplomasi politik kooperatif daripada memilih jalan perang seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Bush Jr. Namun tampaknya, sejak pasca-Peristiwa 11/9, iklim politik luar negeri Amerika Serikat (AS) menjadi tantangan serius bagi kubu Demokrat. Iklim tersebut dimanfaatkan Presiden Bush dan anggota kubu Hawkish untuk memperkuat hegemoni AS terhadap negara-negara Timur Tengah dan Sub-Sahara yang kaya akan minyak bumi.

Ambisi Kubu Hawkish untuk menguasai korporasi minyak dunia mendorong pemerintah Bush Jr. memilih jalan perang untuk menguasai ladang minyak di negara-negara tersebut. Presiden Bush Jr. mengangkat isu terorisme dan Usamah Bin Laden yang notabene identik dengan simbol militan Islam dengan bantuan *mainstream media* berhasil mendorong munculnya "Islam-Phobia" di tengah masyarakat AS. Hal ini dijadikan legitimasi politik Presiden Bush Jr. untuk menyerang kelompok Taliban di Afganistan, dilanjutkan invasi ke Irak dengan mengangkat isu senjata pemusnah massal rezim Saddam Hussein. Kedua perang tersebut telah mengakibatkan AS mengalami krisis ekonomi. Perang tersebut telah menguras biaya lebih dari US\$ 1 triliun dari anggaran pemerintahan Bush Jr. dan lebih dari 4.500 tentara Amerika Serikat

---

<sup>17</sup> Lutfi Kamil, Kerry, Bush, Dan Politik Realisme AS, [http://www.uniscodem.org/article\\_detail.php?aid=4419&coid=1&caid=24&gid=4](http://www.uniscodem.org/article_detail.php?aid=4419&coid=1&caid=24&gid=4) diakses



memungkinkan tercapainya kesepakatan salah satunya di bidang pertahanan keamanan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kesepakatan hankam tersebut antara lain: pemberantasan korupsi, reformasi TNI, dan penegakan HAM.

### C. Rumusan Masalah

Dengan mencermati perkembangan hubungan bidang pertahanan dan keamanan antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat, skripsi ini mengajukan pertanyaan penelitian **“Bagaimana Kebijakan Presiden Barack Obama Terhadap Indonesia Di Bidang Pertahanan Keamanan?”**

### D. Kerangka Teoritis

Teori adalah bentuk penjelasan yang paling umum yang memberitahukan pada kita mengapa sesuatu terjadi. Teori menggabungkan konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis dan saling berhubungan.<sup>19</sup>

Dalam kasus Hubungan Hankam antara Indonesia dan Amerika Serikat penulis menggunakan **Teori Kebijakan Luar negeri**. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang

---

<sup>19</sup> *Teori dan Metodologi Penelitian Politik*, Edisi Kedua, Jilid 1, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 10.



dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>20</sup> Rosenau mengartikan kebijakan luar negeri sebagai “upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.”<sup>21</sup>

Rosenau menjelaskan apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) termasuk di dalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.<sup>22</sup>

Menurut Hans Morgenthau terdapat delapan faktor yang mempengaruhi politik luar negeri sebagai unsur kekuatan nasional, yaitu: (a) Geografi, (b) Sumber-sumber nasional, (c) Kemampuan industri, (d) Kesiapsiagaan militer, (e) Penduduk, (f) Watak nasional, (g) Moral nasional, (h) Kualitas diplomasi. Faktor geografi merupakan faktor terbanyak yang dihubungkan dengan politik luar negeri.<sup>23</sup>

Dalam mengklasifikasikan faktor-faktor atau sumber-sumber politik luar negeri harus dengan cara menempatkan sumber-sumber itu pada kontinu

---

<sup>20</sup> Plano, Jack C. dan Olton, Roy, 1999, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung,: CV. Abardin, hlm. 5.

<sup>21</sup> Rosenau, James N. *et al.*, 1976, *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hlm 27.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>23</sup> Plano, Jack C. dan Olton, Roy, 1999, *Op cit* hlm. 85.

waktu atau *time continu* dan melalui kontinu agregasi sistemik atau *systemic aggregation continu*. Kontinu waktu yang dimaksud Rosenau meliputi *Sources that tend to change slowly*, yaitu sumber-sumber yang cenderung bersifat mantap dan berlaku terus menerus dan tetap dan *Short-term fluctuations*, yaitu sumber-sumber yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi jarak pendek, serta *Sources that tend to undergo rapid change*, yaitu sumber-sumber yang dapat berubah.<sup>24</sup>

Sumber-sumber utama dalam perumusan kebijakan luar negeri, yaitu:

- a. Sumber sistemik (*systemic sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk negara-negara dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis. Yang dimaksud dengan struktur hubungan antara negara besar adalah jumlah negara besar yang ikut andil dalam struktur hubungan internasional dan bagaimana pembagian kapabilitas diantara mereka. Sementara faktor situasional eksternal merupakan stimulan tiba-tiba yang berasal dari situasi internasional terakhir.
- b. Sumber masyarakat (*societal sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup factor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik. Kebudayaan dan sejarah mencakup nilai, norma, tradisi dan

---

<sup>24</sup> Rosenau, J. M. 1956. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press.

pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan antar anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan sendiri. Hal ini dapat mendasari kepentingan negara tersebut untuk berhubungan dengan negara lain. Struktur sosial mencakup sumberdaya manusia yang dimiliki suatu negara atau seberapa besar konflik dan harmoni internal dalam masyarakat. Opini publik juga dapat menjadi faktor dimana penstudi dapat melihat perubahan sentimen masyarakat terhadap dunia luar.

- c. Sumber pemerintahan (*governmental sources*), merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Pertanggungjawaban politik seperti pemilu, kompetisi partai dan tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi eksternal. Sementara dari struktur kepemimpinan dari berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam pemerintahan.
- d. Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*), merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Disini tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai.<sup>25</sup>

Politik luar negeri disusun berdasarkan konsekwensi-konsekwensi yang terjadi di dalam negeri, salah satunya adalah politik domestik (dalam negeri).

---

<sup>25</sup> Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 57-58

Politik domestik sebagaimana disebut oleh Henry Kissinger merupakan pedoman bagi penyusunan kebijakan luar negeri atau dalam istilah Kissinger dinyatakan bahwa "*foreign policy begins when domestic policy ends.*"<sup>26</sup> Istilah Kissinger tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri berkaitan erat dengan kebijakan domestik suatu negara, sehingga sulit untuk memisahkan antara kebijakan luar negeri dengan kebijakan domestik.

*Foreign policy* adalah sebuah strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh decision maker dari sebuah negara terhadap negara lain atau unit internasional yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu<sup>27</sup>

Secara garis besar, Amerika Serikat menggunakan standar ganda dalam berhubungan dengan negara lain. Hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat dalam rangka mencapai tujuan nasional negara tersebut. Tujuan nasional yang ingin dicapai AS antara lain: menjaga nama besar dan sejarah Amerika Serikat selama ini, menjaga stabilitas regional, dan menjamin keamanan negara sekutu dan negara-negara sahabat di seluruh dunia. Sejak terpilihnya Presiden Barrack Obama, Amerika Serikat mengubah arah geostrategi ke kawasan Asia-Pasifik antara lain Indonesia. Upaya tersebut didukung oleh salah satu watak dasar Amerika Serikat yaitu pragmatisme.

Pragmatisme berarti: ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya adalah "faedah" atau "manfaat".

---

<sup>26</sup> Hanrieder, W.F., 1971, *Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays*, New York: David McKay Co., hlm. 22.

<sup>27</sup> Jack C. Blau dan Roy Oltan, *The International Relations Dictionary*, Holt, Reinhart, and Inc.

Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Berdasarkan pengertian tersebut, arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mengarah kepada kepentingan ekonomi di satu sisi, dan di sisi lain tetap mempertahankan hegemoni militer dan pengaruh di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Konsep pragmatisme mengarahkan Amerika Serikat menggunakan standar ganda dalam setiap pelaksanaan kebijakan luar negeri terhadap negara lain.

Dalam kerangka *Grand Strategy*, Amerika Serikat akan tetap mempertimbangkan beberapa hal penting. Pertama, Indonesia dianggap sebagai negara yang secara geografis sangat strategis bagi kepentingan AS. Misalnya saja beberapa tahun lalu ada keinginan kuat dari AS untuk memperoleh pijakan baru di Indonesia sebagai gerak strategis AS menghadapi tantangan baru ancaman non-konvensional. Kedua, Indonesia yang telah memasuki tahapan demokrasi yang cukup matang adalah modal utama bagi AS untuk mengadakan kontak kelembagaan yang dapat menyebabkan meluasnya pengaruh AS di Indonesia, khususnya di tataran elit-kekuasaan. Ketiga, sebagai negara mayoritas Muslim terbesar, Indonesia adalah mitra yang tidak mungkin dikesampingkan terutama dalam upaya pemerintahan Barack Obama untuk menghapus citra kurang baik AS di kalangan negara-negara berpenduduk muslim dalam perang global melawan terorisme. Keempat, walaupun belum sepenuhnya pulih, AS memandang ekonomi yang stabil dan kokoh akan menjadi jalan bagi terus berlangsungnya hubungan simetris dan setara yakni makin kuatnya pengaruh dan AS

dalam transaksi perdagangan internasional serta terbukanya pasar Indonesia bagi ekspor barang-barang dengan teknologi tinggi AS di era *free trade area*.<sup>28</sup>

Kebijakan yang diambil oleh Presiden Barack Obama tidak terlepas dari asalnya yaitu Partai Demokrat. Sebagaimana yang ditulis oleh Lipset (2006) dalam *Political Man*, Partai Demokrat sendiri membawa semangat egaliteranisme, humanisme, anti konservatisme, inklusif, dan menekankan pada aspek pendekatan realisme (*reality*).<sup>29</sup> Karakter Partai Demokrat ini mengarahkan kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama ke arah pendekatan dialog dan perundingan untuk memecahkan masalah tertentu. Hal ini ditandai dengan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menuju ke kawasan Asia sebagai kawasan ekonomi berkembang. Asia merupakan kawasan strategis untuk memperkuat lobi AS di bidang ekonomi daripada politik ditengah upaya Presiden Barack Obama untuk menyelamatkan keuangan AS dan keluar dari krisis ekonomi.

Arah kebijakan luar negeri saat ini merupakan bentuk pragmatisme Amerika Serikat yang menginginkan pemulihan ekonomi domestik. Salah satu bentuk pemulihan ekonomi tersebut dilakukan dengan beberapa negara termasuk Indonesia. Amerika Serikat memprioritaskan pada promosi kerjasama ekonomi dan keamanan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari

---

<sup>28</sup> Yanyan Mochamad Yani, *Hubungan Indonesia-Amerika Serikat Pasca Kemenangan Partai Demokrat*, hlm. 2, <[pustaka.unpad.ac.id/archives/36923/](http://pustaka.unpad.ac.id/archives/36923/)>, diakses tanggal 21 Juni 2012.

<sup>29</sup> Pilpres AS & masa depan dunia, Opini Wasisto Raharjo Jati (online), 21 Januari 2012, <[http://waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=231452:pilpres-as-a-masa-depan-dunia&catid=25:artikel&Itemid=44](http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=231452:pilpres-as-a-masa-depan-dunia&catid=25:artikel&Itemid=44)>, diakses tanggal 21 Juli 2012.

strategi pengamanan kepentingan nasional di wilayah negara asing. Kasus hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia, salah satunya merujuk pada pemulihan hubungan pertahanan keamanan yang menyangkut masalah embargo peralatan militer. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada satu dasawarsa terakhir hampir tidak terpengaruh krisis ekonomi dunia, menjadi magnet tersendiri bagi negara maju seperti AS. Hal inilah yang dilirik oleh Amerika Serikat sejak pemerintahan George Walker Bush Jr. hingga Presiden Barack Obama saat ini. Kepentingan motif ekonomi AS tersebut dibalut dengan dalih peningkatan kerjasama dan hubungan pertahanan keamanan dengan Indonesia. Amerika Serikat didukung oleh beberapa faktor yang memungkinkan untuk menekan posisi Indonesia, seperti yang disebutkan oleh Morgenthau yaitu geografi, kemampuan industri, kesiapsiagaan militer, watak nasional, dan kualitas diplomasi. Semua faktor tersebut berlaku pada hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia saat ini.

Melihat fakta-fakta tersebut, Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama cenderung akan melanjutkan kerjasama pertahanan keamanan dengan Indonesia, seperti yang dilakukan oleh para presiden pendahulunya. Namun prinsip politik luar negeri akan bergeser dari politik ekspansionis ala "Hwakish" menjadi politik diplomasi efektif dan humanis atas dasar karakter politik Partai Demokrat.

#### **E. Hipotesis**

Presiden Barack Obama melanjutkan berbagai kebijakan hankam Amerika Serikat terhadap Indonesia yang pernah dilakukan oleh presiden

Amerika Serikat sebelum Barrack Obama berkuasa, walaupun Barrack Obama dan Presiden sebelumnya berasal dari partai yang berbeda. Amerika Serikat memberikan berbagai bantuan militer Indonesia dalam bentuk CARAT, IMET, FMS, dan FMF.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dilakukan secara sekunder yang data-datanya diperoleh dari buku-buku, artikel dan data-data dari internet yang semuanya terangkum dalam daftar pustaka. Oleh karena jenis penelitian ini bersifat kualitatif maka data akan dianalisa secara deskriptif.

### **2. Teknik Pengambilan Data**

Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka, melalui penerapan: kualitatif yang berisikan kutipan data-data yang memberikan gambaran tentang penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengambilan data menggunakan teknik studi literatur dan dokumentasi yaitu dengan menggunakan media buku, artikel dan data-data dari internet, serta media lain yang dalam bentuk cetak untuk menguatkan data serta memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti.

### **3. Teknik Analisa Data**

Kajian ini merupakan kajian *deskriptif-eksplanatif*, yang bertujuan menggambarkan dan mengidentifikasi kebijakan Presiden Barrack Obama dan SBY dalam meninjau kerjasama bidang Hankam di antara kedua



negara. Fokusnya mengarah pada kebijakan pemberian bantuan militer Amerika Serikat masa Presiden Barrack Obama kepada Indonesia.

Tahap awal pelaksanaan kajian ini, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data dan gambaran tentang bagaimana kebijakan pemberian bantuan militer Amerika Serikat masa Presiden Barrack Obama kepada Indonesia dan upaya diplomasi Indonesia di bawah Presiden SBY dalam memulihkan hubungan Hankam dengan Amerika Serikat, yang sekaligus sebagai landasan untuk dijadikan pertimbangan dalam rumusan selanjutnya.

Setelah itu, data dianalisis secara *deskriptif-eksplanatif*, untuk menjelaskan strategi Hankam Amerika Serikat di bawah Presiden Barrack Obama yang dapat diaktualkan dalam memperbaiki hubungan Hankam AS-Indonesia. Dari hasil analisis ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu penjelasan tentang kebijakan Presiden Barrack Obama terhadap Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka penulis membuat jangkauan penelitian yang hanya dibatasi mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditempuh Presiden Barrack Obama terhadap Indonesia di bidang kerjasama pertahanan dan keamanan kedua negara, sebagai upaya dalam menjalin kembali hubungan bilateral yang harmonis bagi AS-Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2012

## H. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

1. Secara logis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi usaha penelitian selanjutnya.
2. Secara ideal, hasil penelitian ini dapat memperkaya dan menambah *mozaik* deskripsi dan analisa tentang politik luar negeri dalam kaitannya dengan hubungan kerjasama antar negara.

## I. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memperoleh uraian atau gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka diperlukan uraian yang sistematis yakni penulis menyajikan per bab. Di dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab.

Bab I. Pendahuluan, berisikan mengenai alasan pemilihan judul, , latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan yaitu; teori kebijakan luar negeri, pragmatisme, dan teori kepentingan nasional.

Bab II. Garis Besar Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, bab ini akan menjelaskan garis-garis besar kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

**Bab III. Dinamika Hubungan Hankam Amerika Serikat dan Indonesia.**

Bab ini berisikan sejarah dan kerjasama hubungan pertahanan antara Amerika dan Indonesia.

**Bab IV. Kerjasama Pertahanan Keamanan antara Amerika Serikat dan Indonesia pada masa Pemerintahan Barrack Obama.**

**Terdapat Bab V. Daftar Isi, berisikan kesimpulan**